

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 1.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari analisis penelitian pengaruh *e-government* terhadap kinerja pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

- 1) Variabel *Good Governance* merupakan variabel dengan pencapaian kinerja paling tinggi yaitu sebesar 78,57%. Selanjutnya secara berurutan adalah Strategi *E-Government* (78,29%), Lingkungan Internal (78,05%), dan Lingkungan Eksternal (76,18%). Dengan melihat garis kontinumnya, semua variabel masuk kedalam kategori tinggi. Sedangkan untuk variabel Kinerja Pemerintahan menggunakan data rasio, dimana data yang digunakan dalam semua dimensi (IPM, Gini Rasio, PDRB dan IRB) memiliki sebaran yang terbatas dan merupakan data yang baik.
- 2) Secara umum, kinerja pemerintahan sudah berada pada kategori yang tinggi dengan adanya pengaruh dari strategi *e-government*, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Sementara *good governance* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja pemerintahan dengan sub variabel dominan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dipengaruhi secara signifikan oleh strategi *e-government* dengan sub variabel dominan yaitu kemitraan. Selanjutnya strategi *e-government* dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dengan sub variabel dominan yaitu regulasi dan lingkungan internal dengan sub variabel dominan yaitu *leadership*.
- 3) Lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap lingkungan internal. Dalam hal ini, dimensi regulasi memiliki pengaruh paling besar dalam mencerminkan lingkungan eksternal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan dan pengembangan *e-government* serta ketentuan tentang pembatasan sosial atau kegiatan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, sehingga peranan regulasi sangat berpengaruh besar dalam proses internalisasi dalam literasi digital di kalangan aparatur pemerintah, termasuk juga dalam merespon gelombang digitalisasi dan infiltrasinya

kedalam kehidupan masyarakat, dimana tata kelola dan pelayanan publik pun dituntut untuk turut menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

- 4) Lingkungan eksternal dan lingkungan internal keduanya memiliki pengaruh yang besar terhadap strategi *e-government*. Dalam hal ini, lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang lebih positif dan signifikan terhadap strategi *e-government* daripada lingkungan internal. Di Jawa Barat, dimensi regulasi memiliki pengaruh paling besar terhadap strategi *e-government* sambil merefleksikan lingkungan eksternal. Keberadaan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sangatlah penting untuk memaksa pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan *e-government* dalam tata kelola pemerintahannya. Untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh beberapa pihak, dimulai dari pemerintah daerah sendiri dan dilanjutkan evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB serta oleh Kementerian Dalam Negeri, dan melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pendampingan dan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat melakukan upaya preventif agar kebijakan dan/atau keputusan pemerintah daerah tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara eksternal maupun internal.
- 5) Lingkungan internal dan strategi *e-government* memiliki pengaruh yang positif terhadap *good governance* atau tatakelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, lingkungan internal memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap *good governance* daripada strategi *e-government*. Di Jawa Barat, dimensi *leadership* paling berpengaruh dalam merefleksikan lingkungan internal *good governance* pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Peranan *leadership* memegang peranan yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang menyiratkan bahwa kepemimpinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat merupakan faktor utama yang menjadi kekuatan dalam mengelola pemerintahan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hardy-Fanta et al., 2016) bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung pada kepemimpinan. Dalam sejarah telah terbukti dan menunjukkan bahwa perbedaan antara organisasi yang sukses dan gagal sebagian besar dikaitkan dengan kepemimpinan dan tentunya mempengaruhi kinerja organisasi itu sendiri.
- 6) Terdapat pengaruh positif dari strategi *e-government* dan *good governance* terhadap kinerja pemerintahan. Dalam hal ini, pengaruh strategi *e-government* terhadap kinerja

Moch. Lukmanul Hakim, 2023

**MODEL STRATEGI E-GOVERNMENT**

**DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemerintahan lebih dominan daripada *good governance*. Dimensi kemitraan manusia memiliki pengaruh paling besar dalam merefleksikan strategi *e-government* dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Strategi *e-government* yang dapat diterapkan pada strategi operasional pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat khususnya dengan membangun kemitraan atau kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dalam hal pembiayaan untuk membangun dan mengembangkan *e-government* bisa bekerja sama dan memanfaatkan keberadaan Bank Pembangunan Daerah pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan uraian pada pembahasan dan temuan-temuan di atas, berikut ini beberapa rekomendasi akademis dan praktis:

### 1) Rekomendasi Akademis

- a. Hasil kajian makalah ini kemungkinan besar dapat dijadikan acuan oleh para akademisi yang melakukan penelitian tentang *e-goverment*, dimana hasil temuan ini merupakan bagian dari premis untuk mengembangkan kerangka konseptual.
- b. Dari segi *novelty* atau kebaruan, penelitian ini berfokus pada strategi *e-government* yang diterapkan oleh unit analisis, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dalam mempengaruhi kinerja pemerintahan, sehingga penelitian ini memiliki nilai yang baru, berbeda, dan lebih sistematis.
- c. Berdasarkan temuan penelitian disertasi ini, temuan penelitian, dan keterbatasan penelitian, penulis selanjutnya disarankan agar:
  - i. Dalam pengukuran digunakan hanya sebagian kecil dan relatif masih kecil karena hanya dibuat sebanyak 27 unit analisis Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan responden 27 Sekretaris Daerah, tidak melibatkan perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
  - ii. Data yang digunakan penelitian melalui sebaran kuesioner yang didasarkan pada persepsi unit analisis. Persepsi ini tidak mampu mengontrol sepenuhnya terhadap kejujuran dan kesungguhan dalam menetapkan jawaban yang sebenarnya.
  - iii. Faktor lain yang berada di luar model tidak semuanya diteliti, padahal kemungkinan faktor yang tidak diteliti tersebut dapat mempengaruhi tingkat

signifikansi pengujian hipotesis yang ada. Oleh karenanya perlu secara mendalam untuk meneliti variabel faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi strategi dan kinerja pemerintahan.

## 2) Rekomendasi Praktis

Kontribusi pemikiran yang diberikan khususnya untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara nasional lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dikaitkan dengan variabel yang diteliti yaitu faktor yang paling signifikan yang menentukan kinerja pemerintahan dengan sub variabel dominan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah strategi *e-government* (strategi *e-government* dengan sub variabel yaitu kemitraan). Selanjutnya faktor yang mempengaruhi strategi *e-government* adalah lingkungan eksternal dengan sub variabel dominan yaitu regulasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi *good governance* adalah lingkungan internal dengan sub variabel dominan yaitu *leadership*, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang paling penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan adalah strategi *e-government* yang harus ditingkatkan dan *good governance* yang harus dikuatkan dengan merespon perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Oleh karena itu rekomendasi praktis yang diberikan oleh penulis adalah:

- a. Peranan regulasi sangatlah penting untuk mewujudkan kinerja pemerintahan melalui strategi *e-government*, sehingga perlu direspon dengan baik melalui literasi digital oleh semua elemen pemerintahan tentang komitmen memahami pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan. Sejauh ini pemerintah pusat belum mengeluarkan juklak/juknis pengelolaan *e-government*, sehingga perlu inisiatif setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera merumuskan secara bersama-sama dan menerbitkan peraturan kepala daerah yang mengatur ketentuan teknis tentang pengelolaan *e-government* atau SPBE di lingkungan pemdanya masing-masing.
- b. Faktor *leadership* dari para Bupati dan Walikota pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat memegang peranan penting untuk mendorong serta mengkondisikan literasi digital yang lebih masif lagi untuk jajaran di bawahnya serta dalam proses perencanaan dan penerapan strategi *e-government* tata kelola pemerintahan terutama pelayanan publik (*digital services*), sehingga secara langsung akan dirasakan manfaat dan kemudahannya oleh masyarakat.

Moch. Lukmanul Hakim, 2023

**MODEL STRATEGI E-GOVERNMENT**

**DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c. Dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang dimiliki setiap pemda, maka setiap pemerintah kabupaten/kota agar melakukan kemitraan atau kolaborasi dengan berbagai *stakeholders* pemda dalam penerapan dan pengembangan *e-government* nya masing-masing, tidak hanya sekedar memberikan literasi dan pemahaman kepada masyarakat saja, tetapi juga dalam segi pembiayaan dapat memanfaatkan CSR dari perusahaan-perusahaan, termasuk juga dari pihak Bank Pembangunan Daerah di kabupaten/kotanya masing-masing.
- d. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya perlu melakukan *benchmarking* kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang secara berturut-turut selama dua tahun terakhir memperoleh indeks SPBE tertinggi diantara Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.
- e. Adanya evaluasi terhadap pelaksanaan *e-government* yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta asistensi dan supervisi yang semakin ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan serta penyempurnaan penerapan dan pengembangan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan setiap pemerintah kabupaten/kota.